



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERIK SOSTENES
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 247361

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.406.596.000

1. Tanah Seluas 3000 m2 di KAB / KOTA BELITUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 55.500.000
3. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 492.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.848.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 295.248.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 140.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INOVA G Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. KAPAL LAUT/PERAHU, PERAHU KATIR PERAHU TRADISIONAL Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 51.130.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	112.019.561
F. HARTA LAINNYA	Rp.	126.268.366
Sub Total	Rp.	1.836.013.927
III. HUTANG	Rp.	414.005.113
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.422.008.814

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.